

EDISI REVISI

Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI

MUHAMMAD NOOR HALIM PERDANA KUSUMA



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

- ▶ Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI v
- ▶ Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ix

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA xi

PENGANTAR PENULIS xv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR SINGKATAN xxi

BAB I KONSEP-KONSEP PENTING DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1

- A. Pendahuluan 1
- B. Hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara 2
- C. Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara 6
- D. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 6
- E. Asas Legalitas 10
- F. Peraturan Perundang-undangan 14
- G. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 16

BAB 2	KEABSAHAN KEPUTUSAN DAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	21
A.	Aspek Wewenang (Terikat)	22
B.	Aspek Prosedur	24
C.	Aspek Substansi	27
D.	Diskresi (Wewenang Bebas)	27
E.	Tentang Kebatalan (Nietigheid)	29
BAB 3	OBJEK SENGKETA (OBJECTUM LITIS) PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU PERADILAN TUN DAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	33
A.	Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	33
B.	Keputusan Tata Usaha Negara	34
C.	Tindakan Faktual (Sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan) Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	40
D.	Pengecualian Objek Sengketa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	45
E.	Pengecualian Objek Sengketa Pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara	49
BAB 4	SENGKETA KHUSUS DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	51
A.	Perbedaan Sengketa TUN Umum dan Sengketa TUN Khusus	51
B.	Sengketa Khusus di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	52
C.	Sengketa Khusus di Luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	56
BAB 5	SUBJEK-SUBJEK DALAM PERKARA (SUBJECTUM LITIS) DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	63
A.	Subjek Penggugat dan Pemohon	63
B.	Subjek Tergugat dan Termohon	69
BAB 6	UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA	71
A.	Konsep Upaya Administratif	71
B.	Kewajiban Menempuh Upaya Administratif Sebelum Mengajukan Gugatan di Pengadilan	75
C.	Upaya Administratif Rezim UU Peratun	77
D.	Upaya Administratif Rezim UU Administrasi Pemerintahan	78



E. Subjek dalam Upaya Administratif Rezim Administrasi Pemerintahan	78
F. Objek dalam Upaya Administratif Rezim UU Administrasi Pemerintahan	79
G. Prosedur Upaya Administratif Dalam UU Administrasi Pemerintahan	79
H. Upaya Administratif di Luar UU Administrasi Pemerintahan	80
I. Gugatan Ke Pengadilan Setelah Menempuh Upaya Administratif	81
J. Tindakan Faktual Sebagai Objek Upaya Administratif	85
K. Kesimpulan	87
BAB 7 KUASA DI PENGADILAN	91
A. Definisi Kuasa	91
B. Kuasa di Peradilan Tata Usaha Negara	92
C. Kuasa oleh Advokat	92
D. Kuasa oleh Non-Advokat	93
E. Surat Kuasa	94
BAB 8 HUKUM ACARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA UMUM DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI)	97
A. Persidangan Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019	97
B. Pengguna Aplikasi E-Court	98
C. Pendaftaran Gugatan Melalui Aplikasi E-Court	99
D. Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara	100
E. Kompetensi Ptun Vs Pttun Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	102
F. Gugatan Penggugat	104
G. Acara Biasa dan Acara Cepat	105
H. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan	107
I. Penelitian Administratif	107
J. Prosedur Dismissal Atau Rapat Permusyawaratan	108
K. Perlawanan Atas Penetapan Dismissal dengan Acara Singkat	109
L. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik	110
M. Pemeriksaan Persiapan	110
N. Masuknya Pihak Ketiga	112
O. Tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Sampai Replik dan Duplik	113
P. Jawaban dan Eksepsi	114

Q. Replik dan Duplik	117
R. Pembuktian	117
S. Penundaan Keberlakuan Keputusan TUN (Schorsing)	119
T. Tahap Kesimpulan dan Pengucapan Putusan	120
BAB 9 ALAT BUKTI	123
A. Surat atau Tulisan	124
B. Keterangan Saksi	125
C. Keterangan Ahli	125
D. Pengakuan Para Pihak	126
E. Pengetahuan Hakim	127
F. Alat Bukti Elektronik	127
BAB 10 UPAYA HUKUM	129
A. Upaya Hukum dalam Sengketa TUN Umum	130
B. Upaya Hukum dalam Sengketa TUN Khusus	134
BAB 11 EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM	137
A. Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara	137
B. Permohonan Pelaksanaan Putusan Hakim	140
C. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Ketua Pengadilan	140
D. Eksekusi Ganti Kerugian di Peradilan Tata Usaha Negara	141
BAB 12 FIKTIF POSITIF PASCA UU CIPTA KERJA	143
A. Konsep Keputusan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja	143
B. Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permohonan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja dan Permohonan Ganti Kerugian Akibat Keputusan Fiktif Positif di Ombudsman	153
DAFTAR PUSTAKA	157
TENTANG PENULIS	165

